

Tantangan Musik 2026

Perdebatan lama mengenai royalti musik akhirnya menemui titik terang hukum. Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/12/2025), lalu memutuskan bahwa dalam pertunjukan komersial, kewajiban membayar royalti sepenuhnya berada di pundak penyelenggara acara, bukan di tangan musisi atau pelaku yang tampil.

Putusan ini lahir dari kebingungan panjang dan polemik melelahkan akibat pesalinan ambiguitas terhadap frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Ketidakepatutan itu selama ini menciptakan ketakutan di kalangan pemilik usaha, seperti kafe atau restoran, untuk memutar karya musisi karena khawatir akan dituntut biaya dengan mekanisme yang tidak jelas.

Pada musim sendiri, meski merasa hak ekonominya teralihkan, juga terjerit karena dikhawatirkan akan dibutarkan dengan penyelenggara yang merupakan rekan kerja mereka sendiri. Keputusan MK ini dianggap sebagai koreksi struktural yang memberi keadilan lebih besar bagi pencipta lagu.

Sementara itu, di jagat festival musik, ada perbincangan baru yang menguncang kepercayaan publik. *Festival Rastropo 2025*, yang selama ini mengonang narasi kebebasan dan perlawanan diketahui menerima dana sponsor dari PT Freeport Indonesia.

Banyak musisi dan grup band, yang lirik lagunya menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan dan kapitalisme, merasa dikhianati dan menilai menarik diri dari festival. Peristiwa ini memberikan paradoks pahit dalam industri hiburan modern. Bagaimana semangat pemberontakan dalam seni dapat dikomodifikasi dan dijual kembali kepada pencipta, justru dengan dukungan dana dari entitas yang menjadi sasaran kritik itu sendiri.

Di panggung global, konflik geopolitik antara Israel dan Palestina menambah ke dalam dunia musik dengan intensitas yang belum pernah terjadi. Aksi panggung yang dianggap provokatif, seperti yang dilakukan duo punk-rock Bob Vylan dengan *chant* anti-IDF di Glastonbury, berujung pada penyelidikan kepolisian.

Gerakan yang lebih terorganisir kemudian muncul dalam bentuk kampanye *No Music for Genocide*, di



Aris Setiawan

Etnomusikolog,
Pengajar di ISI Surakarta

mana ratusan musisi secara kolektif menarik katalog lagu mereka dari semua layanan *streaming* yang beroperasi di Israel. Boikot ini meluas hingga ke festival-festival besar Eropa. Lebih dari tujuh puluh artis membatalkan penampilan di Sonar Barcelona karena festival itu dimiliki oleh grup konglomerat yang berinvestasi pada produsen senjata Israel.

Amerika Serikat juga tak luput dari kontroversi, dengan iklim politik yang kembali memanas di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Banyak musisi menjadikan panggung mereka sebagai medium protes terbuka, sementara Trump sendiri secara rutin menggunakan lagu-lagu populer tanpa izin untuk mengiringi video propaganda politiknya, seperti yang memicu lagu *Danger Zone* milik Kenny Rogers dan *All-American Girl* milik Olivia Rodrigo.

Dampak kebijakan administrasinya pun dirasakan langsung, festival-festival musik Latin berancam batal karena kekakuan aturan visa dan ketakutan akan penggejekan imigrasi, sementara ancaman pemotongan subsidi layanan kesehatan membuat kekhawatiran pada musisi independen, yang kerap tidak memiliki asuransi, menjadi semakin resistan dan tidak pasti.

Di dalam jantung industri musik sendiri, di era besar mengemuka: keadilan ekonomi di era *streaming* dan gempuran kreativitas artifisial. Sejumlah artis, dipelopori oleh band indie Deerhoof, melakukan aksi protes simbolis dengan membatalkan karya mereka dari Spotify.

Pada saat yang sama, kemajuan keadilan budaya melahirkan polemik baru. Sebuah proyek musik yang sepenuhnya digarap oleh AI berhal-

mayar sebuah band manusia dan meraup jutaan putaran rekaman akhirnya terungkap.

Membara 2026

Dalam pandangan saya, pada 2026, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai royalti membuka jalan bagi struktur ekonomi yang lebih adil bagi pencipta. Putusan ini berpotensi menghidupkan kembali kemunculan karya di ruang komersial seperti kafe dan restoran yang sebelumnya takut akan sanksi hukum.

Namun, antisipasi ini dibayang oleh prospek implementasi yang tidak merata di seluruh pelosok negeri. Mekanismenya pembayaran yang baru justru dapat menjadi penghalang bagi penyelenggara acara skala kecil dan menengah.

Mereka berpotensi beralih ke musik *cover* atau rekaman *royalty-free* untuk menghindari kompleksitas administratif, yang pada akhirnya mempengaruhi pasar bagi karya orisinal musisi lokal. Perubahan ini juga menuntut penciptaan infrastruktur pengumpulan dan distribusi yang transparan.

Gesombang tuntutan transparansi pasokan dari Postprodur mendorong industri festival menuju praktik kurasi dan pendanaan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan lahirnya acara-acara baru dengan integritas etis sebagai nilai jual utama.

Namun, atmosfer kewaspadaan yang tinggi ini berpotensi berakibat menjadi budaya saling curiga dan uji kemurnian ideologis yang membatasi ruang gerak. Sponsor korporat menjadi enggan mendukung acara seni yang dianggap bernamuk kritik sosial, sehingga mengurangi sumber pendanaan yang vital.

Di sisi lain, tekanan untuk selalu "bersih" secara politik dapat memediasi kompleksitas ekspresi artistik. Bukankah mendorong musik ke dalam "kandang aman" justru bertolak belakang dengan semangat pemberontakannya yang dahulu menggetarkan?

Sementara itu, dalam dunia teknologi, pada tahun mendatang koordinasi buatan menawarkan serangkaian alat produksi dan *mastering* canggih dengan biaya rendah. Hal ini meratakan jalur bagi musisi independen untuk menghasilkan kualitas suara yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh studio besar.

Namun, saya menduga alat yang sama juga memungkinkan produksi massal musik generatif memanfaatkan platform *streaming*, sehingga karya manusia asli semakin sulit bersaing untuk mendapatkan perhatian pendengar.

Peraturan hukum mengenai hak cipta atas suara yang dikloning atau melodi yang dihasilkan mesin akan memuncak. Hal ini melahirkan wilayah abu-abu yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada musisi asli yang gya atau karyanya menjadi bahan pelatihan sistem tersebut.

Selanjutnya, peningkatan visibilitas musik Indonesia di panggung internasional melalui platform digital merupakan peluang emas untuk ekspor budaya dan pertukaran artistik. Namun, terpaan pasar global yang cepat juga membawa risiko komodifikasi, di mana elemen-elemen khas dan kompleks dari musik, terutama etnis atau daerah tertentu, disederhanakan menjadi sekadar *sample* atau *sound* untuk memenuhi selera pasar dunia.

Kesuksesan internasional seorang musisi atau satu *genre* tertentu dapat menciptakan tekanan homogenisasi di dalam negeri, di mana pelaku industri terdorong untuk meniru formula sukses tersebut.

Tahun 2026 akan memperlihatkan bahwa dinamika musik, baik di Indonesia maupun global, berada pada persimpangan antara kemajuan dan kerapuhan. Di satu sisi, terobosan musik, tuntutan etis, dan teknologi menjanjikan struktur yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Namun, di sisi lain, setiap langkah ke depan menghadapi risiko distorsi.

Di Indonesia, keadilan dapat terhambat oleh birokrasi, kreativitas bisa tenggelam dalam banjir algoritma, dan identitas dapat tergerus oleh pasar. Masa depan musik tidak hanya akan ditentukan oleh bagaimana kita merespons perubahan, tetapi juga oleh bagaimana kita menjaga keseimbangan esensial antara keadilan dan kebebasan.

Di ujung perdebatan dan silang teknologi, musik akan terus menemukan jalannya. Tugas kita adalah memastikan bahwa musik tidak dikungkung oleh birokrasi, tenggelam dalam banjir algoritma, atau diperdagangkan begitu saja tanpa kejelasan atas hak cipta.

TAJUK

Anak dalam Pusran Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Boyolali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Polres Boyolali mencatat, pada 2025 terdapat 101 laporan polisi, meningkat dibandingkan 129 laporan pada 2024. Artinya, terjadi kenaikan sebanyak 52 laporan atau sekitar 40,31% dalam satu tahun.

Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya tindak kejahatan, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas persoalan sosial yang kian mendalam. Lebih memprihatinkan lagi, dari total 162 terdakwa pada 2025 laporan pada 2024, artinya, terjadi sebagai pelaku. Data tersebut menunjukkan anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga terseret menjadi pelaku dalam pusaran kriminalitas.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali menerima 30 laporan terkait kasus kriminalitas yang ditangani PPA sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 27 laporan (71,05%) telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus terbanyak adalah persetubuhan atau perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur dengan 14 laporan, disusul kekerasan terhadap anak dengan delapan laporan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan enam laporan.

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak sebagai korban maupun pelaku kekerasan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Peralatan ini tidak bisa dilihat semata sebagai urusan aparat penegak hukum. Lebih dari itu, kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural yang belum tertangani secara serius.

Khusus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, terdapat fakta bahwa mayoritas pelaku berasal dari keluarga atau orang terdekat. Hal ini menunjukkan rapuhnya ruang paling dasar dalam perlindungan anak, yakni keluarga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi sumber trauma.

Kondisi ini menuntut penelusuran mendalam terhadap akar persoalan. Faktor ekonomi, disharmoni keluarga, pola asuh yang keliru, serta lingkungan sosial yang tidak sehat saling berkaitan dan memperbesar kerentanan anak. Anak yang tumbuh tanpa